

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang terjadi pada era reformasi tahun 1998 mengakibatkan berkurangnya dominasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di daerah. Desentralisasi melahirkan adanya otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerahnya sehingga dapat tercipta pelayanan masyarakat yang lebih optimal.

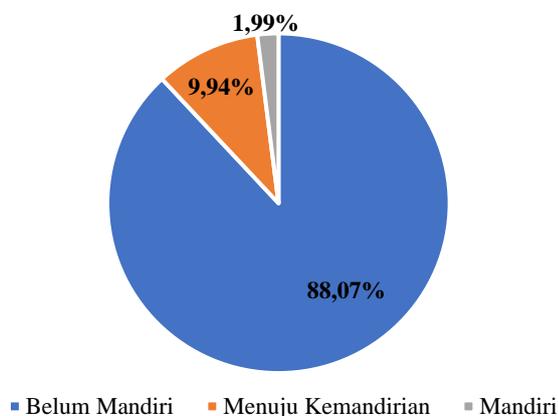
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (kepala daerah) dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa adalah otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Pada hakikatnya, otonomi daerah diorientasikan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah, kesejahteraan rakyat, prakarsa masyarakat, dan pendayagunaan potensi daerah (Ishak et al., 2020). Selain itu, pemerintah pusat akan memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya, sehingga campur tangan pemerintah pusat akan menurun dan berfokus pada urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah didorong untuk berkoordinasi dalam pengelolaan urusan pemerintahannya agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Kewenangan terkait penerimaan pendapatan daerah telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dari total pendapatan akan menghasilkan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, begitu pula sebaliknya (Ishak et al., 2020). Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi mengindikasikan bahwa aktivitas belanja daerah banyak didanai dan dialokasikan dari sumber pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian, pemerintahan daerah yang mandiri ialah pemerintahan daerah yang mampu mengurangi ketergantungannya atas pemerintah pusat.

Berikut disajikan analisis atas indeks kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020.

Indeks Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2020)

Gambar 1.1 Indeks Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia dikategorikan sebagai “Belum Mandiri”. Dari 503 pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, 443 atau 88,07% pemerintah daerah berstatus belum mandiri, 50 atau 9,94% pemerintah daerah berstatus Menuju Kemandirian, dan 10 atau 1,99% pemerintah daerah berstatus Mandiri. Hasil

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

analisis Badan Pemeriksa Keuangan juga menyebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki proporsi status kemandirian keuangan yang lebih baik, disusul oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten (BPK, 2021).

Terdapat data distribusi provinsi di wilayah Indonesia berdasarkan kategori kemandirian menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2022 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Kemandirian Tahun 2019-2022

KATEGORI KEMANDIRIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Rendah Sekali (0-25%)	10	8	7	5
Rendah (>25-50%)	16	18	19	16
Sedang (>50-75%)	8	8	8	13
Tinggi (>75%)	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL	34	34	34	34

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Data yang tersaji pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, rata-rata kemandirian keuangan provinsi di Indonesia masih berada dalam kategori rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh 73 persen provinsi berada dalam kategori rendah dan rendah sekali. Di sisi lain, provinsi yang termasuk dalam kategori kemandirian keuangan sedang mencapai 27 persen. Namun, belum ada provinsi yang memiliki kategori kemandirian yang tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah.

Provinsi yang tidak mandiri secara keuangan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran daerah berasal dari bantuan atau dana alokasi dari pemerintah pusat, bukan dari pendapatan yang daerah tersebut hasilkan sendiri. Ketergantungan ini akan menyebabkan pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan yang independen karena harus menyesuaikan program dan kebijakannya dengan prioritas dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang rendah juga akan membatasi kemampuan pemerintah provinsi untuk berinvestasi dalam proyek-proyek inovatif atau mengembangkan

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sektor-sektor ekonomi baru. Oleh karena itu, hal ini dapat mengurangi daya saing daerah dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat telah melakukan analisis atas kemandirian keuangan pada berbagai pemerintah daerah yang tersebar di wilayah Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

KATEGORI	JUMLAH PEMDA	SEBARAN (Diurutkan Dari Nilai Tertinggi Ke Terendah)	RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN
Sangat Baik (>50%)	3 Pemda	Kab. Bekasi	53,43%
		Kota Bogor	52,83%
		Kota Bekasi	51,19%
Baik (40,01%-50%)	4 Pemda	Kota Depok	47,51%
		Kab. Bogor	41,62%
		Kota Bandung	41,18%
		Kab. Karawang	40,82%
Cukup (30,01%-40%)	3 Pemda	Kota Cimahi	36,10%
		Kota Cirebon	34,12%
		Kota Sukabumi	32,47%
Sedang (20,01%-30%)	4 Pemda	Kab. Purwakarta	27,16%
		Kab. Bandung Barat	23,26%
		Kab. Cirebon	20,68%
		Kota Banjar	20,23%
Kurang (10,01%-20%)	8 Pemda	Kab. Bandung	19,37%
		Kab. Sukabumi	18,06%
		Kab. Majalengka	16,10%
		Kab. Sumedang	15,38%
		Kab. Subang	15,35%
		Kab. Cianjur	15,01%
		Kab. Garut	11,23%
Sangat Kurang (0,00%-10%)	5 Pemda	Kab. Pangandaran	9,66%
		Kab. Indramayu	9,04%
		Kab. Tasikmalaya	8,67%
		Kota Tasikmalaya	6,77%
		Kab. Kuningan	0,94%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Jawa Barat (2024)

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Jawa Barat, diketahui bahwa dari 27 pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, hanya terdapat 3 pemerintah daerah dengan rasio kemandirian keuangan dalam kategori yang sangat baik. Rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan nilai rasio 53,43 persen, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki rasio keuangan daerah terendah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan nilai rasio sebesar 0,94 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan masih bergantung pada bantuan serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, baik dalam sistem pembiayaan maupun pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Jika pemerintahan daerah belum mandiri atau memiliki kategori kemandirian keuangan daerah yang rendah, maka hal ini akan menimbulkan beberapa kekhawatiran khususnya bagi pembangunan daerah. *Pertama*, terbatasnya anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan lebih mengandalkan bantuan dana transfer dan subsidi dari pemerintah pusat. Jika hal ini dilakukan, maka pemerintah daerah akan kurang leluasa dalam menentukan kebijakan dan program pembangunannya. Hal ini akan berbeda jika dana yang digunakan berasal dari pendapatan asli daerah, pemerintah akan lebih leluasa untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari daerah yang dipimpinnya. *Kedua*, penurunan kualitas pelayanan publik. Jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, maka tidak semua kegiatan belanja dapat terlaksana karena adanya keterbatasan dana. Oleh sebab itu, pemerintah daerah cenderung akan mengutamakan kegiatan belanja yang bersifat rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional. Akibatnya, kebutuhan belanja dari aspek lain akan dikurangi atau bahkan dihilangkan. *Ketiga*, terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibat dari adanya penurunan kualitas pelayanan publik,

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesejahteraan masyarakat sekitar pun akan turut terimbas dan mengalami penurunan kualitas (Halim & Iqbal, 2012).

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Pernyataan menyatakan bahwa selain berperan sebagai pengelola urusan pemerintahan, pemerintah daerah juga menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam menciptakan keuangan daerah yang mandiri. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Mahmudi, 2017). Adapun menurut pendapat Halim & Iqbal (2012 : 232):

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa daerah yang mampu memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya akan memiliki kemandirian keuangan yang meningkat.

Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan asli daerah diartikan sebagai penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, laba dari badan usaha milik daerah, dan lain sebagainya. Kemandirian keuangan dinilai baik saat pendapatan asli daerah dapat menyokong sebagian besar dari total pendapatan daerah daripada sumber lainnya (Novindriastuti & Purnomowati, 2020). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan pengelolaan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam menggunakan PAD tersebut untuk kegiatan pemerintahannya (Mahmudi, 2010).

Selain dari aspek penerimaan seperti pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan adanya upaya untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah ini berkaitan dengan kegiatan belanja yang dilakukan oleh suatu daerah. Berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, kegiatan belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung (Mahmudi, 2010). Belanja modal termasuk dalam kategori belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan suatu program atau kegiatan. Mahmudi (2010), mendefinisikan belanja modal sebagai belanja yang digunakan untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti pembelian tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagainya.

Belanja modal dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah jika diarahkan dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik (Mardiasmo, 2018). Anggaran belanja modal salah satunya dapat diinvestasikan pada fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya yang sifatnya meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang merupakan landasan penting untuk membangun kemandirian keuangan. Selanjutnya, infrastruktur dan aset yang baik akan membuka akses bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan eksternal seperti perusahaan swasta atau lembaga internasional. Pembiayaan ini akan memberikan tambahan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dengan berbagai sumber dana ini, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Belanja modal merupakan jenis belanja yang paling banyak menjadi target penyelewengan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tanggal 2 Mei 2023, terdapat 4 pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pengelolaan belanja modalnya belum efektif. Pemerintah kabupaten tersebut diantaranya adalah Pemkab. Bandung, Pemkab. Garut, Pemkab. Tasikmalaya, dan Pemkab. Cirebon. Hasil pemeriksaan

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BPK tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait belanja modal yang ditemukan, seperti pemilihan proyek yang tidak tepat sasaran, hingga proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan yang belum memadai. Hal ini dapat terjadi karena belanja modal memiliki nilai nominal yang besar karena terkait dengan pengadaan atas aset tetap dan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Fenomena tersebut menyebabkan jenis belanja modal perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar pengelolannya dapat terkendali dan tidak menjadi penghambat dalam mewujudkan keuangan daerah yang mandiri.

Berikut disajikan data terkait laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional atas dasar harga konstan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Nama Pemda	PDRB (%)	No	Nama Pemda	PDRB (%)
1	Kab. Bandung	3,86	15	Kab. Subang	3,20
2	Kab. Bandung Barat	3,47	16	Kab. Sukabumi	3,42
3	Kab. Bekasi	3,44	17	Kab. Sumedang	4,34
4	Kab. Bogor	3,79	18	Kab. Tasikmalaya	3,46
5	Kab. Ciamis	4,17	19	Kota Bandung	5,04
6	Kab. Cianjur	3,55	20	Kota Banjar	2,65
7	Kab. Cirebon	2,99	21	Kota Bekasi	3,94
8	Kab. Garut	4,18	22	Kota Bogor	4,54
9	Kab. Indramayu	1,76	23	Kota Cimahi	5,25
10	Kab. Karawang	4,75	24	Kota Cirebon	3,75
11	Kab. Kuningan	4,15	25	Kota Depok	3,39
12	Kab. Majalengka	5,32	26	Kota Sukabumi	3,69
13	Kab. Pangandaran	3,87	27	Kota Tasikmalaya	3,64
14	Kab. Purwakarta	3,49			

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Data yang tersaji pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB pada setiap pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat berbeda-beda. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat adanya perbedaan karakteristik dan ciri khusus pada masing-masing pemerintah daerah. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah cenderung memiliki kesulitan dalam memaksimalkan penerimaan dan meminimalkan pengeluarannya (Pratama, 2014). Selain itu, kebutuhan atas belanja juga dapat berbeda pada setiap pemerintah daerah

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bergantung pada prioritas dan kebutuhannya. Dengan demikian pendapatan asli daerah dan belanja modal juga dapat berbeda dalam mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Peningkatan kemandirian keuangan dapat diperkuat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Diaman & Handayani, 2023). Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah dan belanja modal sebagai variabel bebas, sedangkan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel moderasi. Sejumlah penelitian terkait dengan pendapatan asli daerah atau PAD diantaranya telah dilakukan oleh Malau & Simarmata (2020), Rivandi & Anggraini (2022), Yuliyanti et al. (2019), Arify (2020), Oktavia & Handayani (2021), dan Akbar (2022) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmila (2023) yang menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian terkait dengan belanja modal telah dilakukan oleh Kusmila (2023) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Burhan et al. (2022) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Arify (2020), Handayani & Erinos (2020), Malau & Simarmata (2020), Oktavia & Handayani (2021), Rivandi & Anggraini (2022), dan Sarumaha & Annisa (2023) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, terdapat penelitian Akbar (2022), Amalia & Haryanto (2019), Nainggolan et al. (2023), dan Yahya & Widajantie (2023) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun penelitian yang menjelaskan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah telah dilakukan oleh Arify (2020). Penelitannya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Handayani & Erinos (2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menyebabkan kesenjangan penelitian atau disebut dengan *research gap*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pendapatan asli daerah, belanja modal, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022?

5. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan gambaran dan pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui gambaran pendapatan asli daerah, belanja modal, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022
2. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022
3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022
4. Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022
5. Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terkait dengan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik terkait dengan kemandirian keuangan daerah, khususnya mengenai gambaran dan pengaruh pendapatan asli daerah serta belanja modal

Riris Nurjanah, 2024

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat empiris

a. Bagi pemerintah daerah

Manfaat empiris dari penelitian ini untuk pemerintah daerah adalah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan belanja daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah.

b. Bagi pembaca

Manfaat empiris dari penelitian ini untuk pembaca adalah meningkatkan wawasan terkait pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan wawasan terkait dengan pendapatan asli daerah dan belanja modal dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan pada suatu pemerintahan daerah.

c. Bagi penulis

Manfaat empiris dari penelitian ini untuk penulis adalah menambah wawasan terkait dengan pendapatan asli daerah dan belanja modal yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kemandirian keuangan dari suatu pemerintahan daerah.